

**Tinjauan Hukum Acara Pidana Islam Tentang Pembuktian
Tindak Pidana Perjudian Online Dalam Putusan Perkara Nomor
136/Pid.B/2015/Pn.Spg**

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Habiburrahman
NIM. C73214057



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Progam Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Surabaya
2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Habiburrahman
NIM : C73214057
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum
Pidana Islam (Jinayah)
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Acara Pidana Islam Tentang
Pembuktian Tindak Pidana Perjudian Online
Dalam Putusan Perkara Nomor
136/Pid.B/2015/Pn.Spg

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 10 Oktober 2018



menyatakan

Muhammad Habiburrahman
Nim: C73214057

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Habiburrahman NIM. C73214057 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan.

Surabaya, 23 Oktober 2018

Pembimbing




H. Mahir Amin M. Fil. I
NIP.197212042007011027

PENGESAHAN

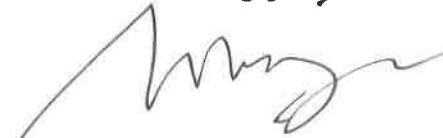
Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Habiburrahman ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 06 November 2018 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,


H. Mahir Amin M. Fil. I
NIP.197212042007011027


Penguji II, ✓


Dr. Sri Warjiyati, SH. MH
NIP.196808262005012001

Penguji III,


Dr. H. Priyo Handoko, SS, SH,
M. Hum
NIP.196602122007011049

Penguji IV,


Siti Tatmainnul Qulub, M.SI.
NIP.198912292015032007

Surabaya, 07 November 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP.195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Habiburrahman
NIM : C73214057
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
E-mail address : habiburrahman.hpi14@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Tinjauan Hukum Acara Pidana Islam Tentang Pembuktian Tindak Pidana Perjudian Online
Dalam Putusan Perkara Nomor 136/Pid.B/2015/Pn.Spg.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 08 November 2018

Penulis

Muhammad Habiburrahman
NIM. C73214057

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Acara Pidana Islam Tentang Pembuktian Tindak Pidana Perjudian Online Dalam Putusan Perkara Nomor 136/Pid.B/2015/Pn.Spg” ini bertujuan untuk: (1) mengetahui pertimbangan hukum hakim, (2) menganalisis dari perspektif hukum acara pidana yang diterapkan oleh majelis hakim, dan (3) menganalisis dari perspektif hukum acara pidana Islam.

Teknik pengumpulan data dilakukan oleh penulis dengan cara studi kepustakaan dengan pengumpulan dokumen-dokumen terkait permasalahan. Selanjutnya data dianalisis menggunakan pola pikir deduktif, yaitu analisis yang berangkat dari kebenaran umum suatu fenomena dan mengeneralisasi kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang memiliki kesamaan dengan fenomena yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diketahui bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perjudian biasa terhadap tindak pidana perjudian online dalam putusan nomor 136/Pid.B/2015/Pn.Spg adalah dikarenakan tidak ada didakwaan sehingga dalam putusannya hakim memutuskan dengan menggunakan dengan pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP, sesungguhnya fakta yang ada dipersidangan menunjukkan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian online yang di atur oleh undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik yang tertuang dalam pasal 27 ayar 2. Didalam KUHP pasal 63 ayat 2 yang dikenal dengan *asas lex specialis derogate lex generali* menyatakan, jika perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum diatur pula dalam aturan yang khusus, maka yang khusus itulah yang dikenakan. Dari analisis penerapan hukum acara pidana, majelis hakim lebih condong menggunakan teori pembuktian *convention in time* sehingga keyakinan hakim sangat kuat pengaruhnya terhadap putusan. Dalam hukum acara pidana islam alat bukti yang diajukan oleh para pihak, yakni pengakuan (*ikrar*), kesaksian (*syahadah*), petunjuk (*qorinah*), dan sumpah (*yamin*).

Sejalan dengan hal tersebut, maka penulis menyarankan kepada aparat penegak hukum, khususnya para hakim agar senantiasa berpaku kepada teori pembuktian yang dianut dalam KUHAP serta Undang-undang yang berlaku, agar dalam penerapannya memberikan suatu kepastian hukum.

Perjudian menurut R, soesilo adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan, juga apabila kesempatan itu menjadi lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau dengan ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya.

Indonesia merupakan salah satu Negara yang mengatur perjudian sebagai aktifitas yang tidak legal. Dalam prespektif hukum positif perjudian merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum. didalam

⁴ Kartini, kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta Cv Rajawali: 1983), 65.

Di dalam suatu hukum mempunyai suatu asas, asas adalah dasar yang dijadikan pijakan atau tumpuan berfikir berpendat atau bertindak. Didalam kitab undang-undang hukum pidana terdapat *asas lex specialis derogate lex generalis*, merupakan asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*), asas tersebut terkandung dalam pasal 63 ayat 2 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP).⁷

⁵ Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

⁷ Ibid., 63.

Dalam kasus ini penulis akan membahas terkait dengan perbedaan unsur-unsur yang ada pada tindak pidana perjudian biasa dan tindak pidana perjudian online. Perjudian biasa dan perjudian online pada

⁹Moeljatno, *Kitab undang-undang.*,27.

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ^ط فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
وَأَمْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ
إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى^ج وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا

Artinya: “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil”.¹⁰

Al-qur'an menyebutkan pembuktian hanya semata-mata dalam arti dua orang saksi, akan tetapi, juga dalam arti keterangan, dalil, dan alasan, baik sendiri maupun komulasi. Rosulullah Saw, juga memeritahkan prihal pembuktian mengenai apa yang telah didakwakan kepada seseorang untuk

[illegible]

Islam mengharamkan perjudian, dan menganggap bahwa perjudian itu suatu dosa besar, sama dengan meminum-minuman keras (*khamar*), sama dengan tukang tenung bahkan sama dengan menyembah berhala. Dalam ayat ini judi disenafaskan dengan menyembah berhala, minum-minuman keras, dan mengundi nasib, yang semuanya merusak masyarakat dan menghancurkan budi pekerti.¹³

¹² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alqur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Pt Macananjaya Cemerlang, 2015), 111-112.

[illegible]

Salah satu yang menjadi bagian dari persidangan adalah pembuktian. Pembuktian merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ini akan ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh Undang-Undang tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa maka terdakwa akan dibebaskan. Namun sebaliknya apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184, maka terdakwa akan dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman oleh majelis hakim. Oleh karena itu hakim harus cermat dan berhati-hati dalam mempertimbangkan nilai pembuktian. Meneliti sampai batas minimum kekuatan pembuktian (*bewijs kracht*) dari setiap alat bukti yang tertuang dalam pasal 182 KUHP.¹⁴

Dari latar belakang yang telah di uraikan diatas, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tentang pembuktian perjudian online, hal ini yang menarik perhatian peneliti untuk membahas lebih jauh mengenai permasalahan tersebut. Maka disini peneliti mengangkat judul : **“Tinjaun Hukum Acara Pidana Islam Tentang Pembuktian Tindak Pidana**

[illegible]

Dari paparan latar belakang di atas maka pokok yang akan di kaji dalam pembahasan ini adalah:

- Dari identifikasi beberapa masalah tersebut, maka penulis akan membatasi permasalahan yang akan dibahas, yakni:

- [illegible]

Rumusan masalah yang dapat diangkat berdasarkan latar belakang diatas adalah:

- ## D. Kajian Pustaka

Penelitian tentang tindak pidana perjudian online memang cukup banyak dan beragam, namun keberagaman tema tersebut justru

[illegible]

1. Skripsi tentang Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perjudian Online Di kota Makassar (studi putusan: 587/Pid.B/2013/PN.Mks) yang ditulis oleh Risman yang mana dalam skripsi ini membahas pokok masalah penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya perjudian online di kota Makassar dan pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan terhadap pelaku perjudian online dengan no register perkara 587/Pid.B/2013/PN.Mks di Makasar.
2. Skripsi tentang Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Perjudian Dalam *Qanun* Provinsi Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 Tentang *Maisir*. Yang ditulis oleh Uswatun Khasanah yang mana dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap sanksi bagi pelaku tindak pidana perjudian dalam *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 tahun 2003 Tentang *Maisir* (Perjudian).
3. Skripsi tentang tinjauan yuridis tindak pidana perjudian togel terhadap anak dibawah umur (studi kasus di polsek Genuk Semarang) yang ditulis oleh Agung Susanto yang mana dalam skripsi ini pembahasannya lebih menitik beratkan pada anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana perjudian tersebut.

1. Skripsi tentang Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perjudian Online Di kota Makassar (studi putusan: 587/Pid.B/2013/PN.Mks) yang ditulis oleh Risman yang mana dalam skripsi ini membahas pokok masalah penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya perjudian online di kota Makassar dan pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan terhadap pelaku perjudian online dengan no register perkara 587/Pid.B/2013/PN.Mks di Makasar.
2. Skripsi tentang Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Perjudian Dalam *Qanun* Provinsi Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 Tentang *Maisir*. Yang ditulis oleh Uswatun Khasanah yang mana dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap sanksi bagi pelaku tindak pidana perjudian dalam *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 tahun 2003 Tentang *Maisir* (Perjudian).
3. Skripsi tentang tinjauan yuridis tindak pidana perjudian togel terhadap anak dibawah umur (studi kasus di polsek Genuk Semarang) yang ditulis oleh Agung Susanto yang mana dalam skripsi ini pembahasannya lebih menitik beratkan pada anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana perjudian tersebut.

4. Skripsi tentang peranan kepolisian dalam mencegah dan menanggulangi perjudian di wilayah polrestabes Banyumas yang ditulis oleh Regina Megahari yang membahas tugas pokok, fungsi, dan peranan kepolisian yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Nasional.

Kajian pustaka ini, pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian lain, sejenisnya yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, agar tidak ada pengulangan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa penelitian yang telah dilakukan oleh para penulis sebelumnya tetap menjadi bahan rujukan atau masukan dalam penulisan skripsi ini.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi, adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan dalam tindak pidana perjudian dalam perkara nomor 136/Pid.B/2015/PN.Spg
2. Untuk mengetahui tentang prosedur pembuktian dalam menjatuhkan putusan dalam tindak pidana perjudian dalam perkara nomor 136/Pid.B/2015/PN.Spg

- Dalam setiap penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan sehubungan dengan penelitian ini adalah :

- [illegible]

Metode penelitian ini bermakna seperangkat pengetahuan langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk di olah, dianalisis, diambil kesimpulan, dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya.¹⁸ Metode dalam penulisan sekripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sesuai dengan tujuan yang dirumuskan, maka data yang diperlukan adalah data yang terkait dengan data sumber primer dan sumber data sekunder yaitu tentang pendapat hakim dan penjelasan tentang hukum acara pidana Islam dalam kasus perjudian berdasarkan studi putusan Nomor 136/PID.B/2015/PN.Spg.

[illegible]

5. Aziz Syamsuddin. *Tindak Pidana Khusus*. Cet. II. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
 6. Siswanto Sunarso. *Filsafat Hukum Pidana Konsep, Dimensi, dan Aplikasi*. Jakarta: Rajawali Pers. 2015.
 7. Zainuddin Ali. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
 8. Al-jauziyah Ibnu Qayyim. *Hukum Acara Peradilan Islam*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2005.
 9. Kartini, kartono. *Patologi Sosial*. Jakarta: CV Rajawali. 1983.
 10. Drs. H. Ahmad Wardi Muslich. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Sinar Grafika. 2005.
3. Teknik pengumpulan data

Teknik analisa data adalah menggunakan suatu metode atau cara mengelola sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan terutama masalah tentang sebuah penelitian. Analisis data menggunakan deskriptif analisis yaitu menggambarkan sifat atau keadaan yang dijadikan obyek dalam penelitian. Dengan mengacu ketentuan tersebut maka langkah selanjutnya adalah mendeskripsikan data primer maupun data sekunder dengan dasar setandar dan unsur rasionalitas. Metode ini bertujuan, untuk menggambarkan keadaan dalam pelaksanaan penjatuhan Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 136/PID.B/2015/PN.Spg. data tersebut dinilai dan diuji dengan ketentuan yang sudah ada, sesuai dengan KUHP dan KUHAP yang berlaku dimasa sekarang.

Untuk memberikan gambaran secara jelas dan agar pembaca segera mengetahui pokok-pokok skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika yang terdiri dari 5 bab yaitu :

Pendahuluan yang terdiri atas: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil

Bab ini menjelaskan tentang kerangka teoritis yang didalamnya menjelaskan pembuktian dalam prespektif hukum acara pidana dan hukum acara pidana Islam.

Bab ini menjelaskan tentang deskripsi kasus perjudian perkara nomor 136/PID.B/2015/PN.Spg. Putusan Pengadilan Negeri Sampang, pertimbangan hukum hakim, amar putusan.

Pada bab ini akan menjelaskan tentang Tinjauan hukum acara pidana dan hukum acara pidana Islam terhadap pembuktian tindak pidana perjudian online putusan nomor 136/PID.B/2015/PN.Spg.

Pada bab ini merupakan bagian terakhir dari penyusunan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran.

TEORI PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA DAN HUKUM ACARA PIDANA ISLAM

1. Definisi Pembuktian Dalam Hukum Pidana

Didalam kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHP) tidak memberikan suatu definisi mengenai pembuktian. Namun didalam kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHP) mengatur mengenai alat bukti yang tertuang dalam pasal 184.¹

¹ Ikhwān Fahroji, *Hukum Acara Pidana Korupsi*, (Jakarta: Setara Press, 2016), 76.

Pembuktian meliputi ketentuan yang mengatur tentang alat bukti yang sah menurut undang-undang yang berlaku, yang dijadikan pedoman hakim untuk membuktikan suatu kesalahan yang didakwakan kepada seseorang. Dari sisilain Pembuktian memiliki arti bahwa tindak pidana yang terjadi atau suatu peristiwa pidana terjadi, memang terdakwa yang melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan kepadanya, dan benar adanya suatu tindak pidana atau peristiwa pidana telah dilakukan oleh terdakwa, sehingga terdakwa harus menebus kesalahannya dan bertanggungjawab atas perbuatannya sesuai dengan ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku.³

1. Suatu ketentuan- ketentuan dalam persidangan untuk mencari suatu kebenaran dan mempertahankan akan suatu kebenaran dihadapan persidangan. Diantarnya hakim, jaksa penuntut umum, terdakwa, dan penasihat hukum, dalam hal ini semua pihak terikat

⁴ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan.*, 274.

Dalam mencari suatu kebenaran untuk menjatuhkan putusan terhadap suatu tindak pidana yang akan dijatuhkan pada terdakwa, maka majelis hakim harus memutus berdasarkan fakta-fakta dalam pembuktian persidangan dan berdasarkan alat bukti yang sah menurut undang-undang yang berlaku, dan sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 184 ayat 1 kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHP).

Pada hakikatnya suatu pembuktian mulai dilakukan sejak terjadinya suatu peristiwa pidana atau peristiwa hukum yang dilakukan oleh seseorang. Apabila ditemukan suatu bukti terjadinya suatu tindak pidana

[illegible]

minimal 2 alat bukti yang disebutkan dalam pasal 183 kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP), dan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana maka tersangka dapat diproses lebih lanjut ketahap penyelidikan.

Pada dasarnya sistem pembuktian bertujuan untuk mengetahui dan meletakkan suatu hasil pembuktian dalam persidangan, terhadap suatu tindak pidana yang sedang diperiksa. Dalam hal ini ada 4 sistem pembuktian, yaitu:⁵

1. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (*Positief Wettelijk Bewijstheori*).

Dalam sistem pembuktian *Positief Wettelijk Bewijstheori* yaitu berdasarkan terpuhinya alat bukti menurut undang-undang yang berlaku. Ketika majelis hakim mempunyai keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana akan tetapi alat bukti yang di ajukan didalam persidangan tidak terpenuhi dengan sesuai ketentuan yang di atur oleh undang-undang, maka terdakwa tidak bisa dijatuhkan pidana dengan kata lain terdakwa bebas dari sanksi pidana dan bebas dari jeratan hukum. Dalam sistem pembuktian ini majelis hakim akan berupaya untuk membuktikan

⁵ Andi, Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), 251.

keyakinan dari hati nurani hakim itu sendiri, bahwa terdakwa melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan pada dirinya.⁷

Dalam sistem pembuktian ini dapat dikatakan bahwa majelis hakim sebagai orang yang tidak pernah melakukan salah (*judge can do no wrong*) . sistem pembuktian ini banyak di gunakan di negara Prancis, dalam putusannya tersebut banyak menghasilkan putusan bebas dan tidak mencerminkan terhadap suatu kepastian hukum dan rasa keadilan.⁸

3. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan logis (*Conviction In Raisonee*).

Sistem pembuktian *conviction in raisonee* merupakan sistem pembuktian yang menyatakan bahwa keyakinan hakim memiliki suatu peran penting untuk menentukan salah atau tidak seseorang terhadap apa yang telah didakwakan kepadanya. Sistem Pembuktian *conviction in raisonee* ini berbeda dengan sistem pembuktian *convention in time* . dalam sistem pembuktian *conviction in raisonee* yangmana dalam sistem pembuktian ini keyakinan hakim harus disertai dengan suatu alasan yang jelas.⁹

⁷ Hendrastanto Yudowidakdo, dkk, *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), 238.

⁸ Ikhwan Fahrojih, *Hukum Acara Pidana*, 78.

⁹ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan*, 277.

4. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif
(*Negatief Wettelijk Stelsel*)

Maka oleh sebab itu, sistem pembuktian *negatief wettelijk stelsel* ini merupakan sistem pembuktian perbandingan antara sistem pembuktian *positief wettelijk bewijstheori* dengan sistem *conviction in time* yang memadukan unsur objektif dan subjektif dalam memutuskan seseorang bersalah atau tidaknya.

[illegible]

a. Keterangan Saksi

Keterangan saksi terdapat di pasal 1 butir 27 kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHP), keterangan saksi adalah keterangan dari seseorang mengenai suatu peristiwa hukum atau peristiwa pidana yang dia dengar sendiri, dia lihat sendiri, dan dia alami sendiri disertai dengan suatu alasan atas pengetahuannya.

b. Keterangan Ahli

Keterangan ahli bersarkan pasal 1 butir 28 KUHAP memberikan pengertian bahwa Keterangan ahli adalah suatu keterangan yang diberikan oleh seorang ahli yang memilki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara tindak pidana yang dilakukan guna kepentingan pemeriksaan.¹²

c. Surat

Alat bukti surat diatur pada pasal 187 KUHAP. Dalam ketentuan tersebut, surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang adalah surat surat yang dibuat atas sumpah jabatan dan surat yang dikuatkan dengan sumpah.

¹² Pasal 1 butir 28 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

1. Surat dan berita acara yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang yang dibuat dihadapannya, yang berisi mengenai kejadian, keterangan, dilihat, dialami sendiri, dengan disertai alasan yang jelas dan logis tentang keterangannya.
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu keadaan.
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

[illegible]

d. Petunjuk

berdasarkan pasal 188 kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHP) ayat 1, petunjuk adalah suatu perbuatan, kejadian atau keadaan tertentu, karena persesuainya, baik atara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana.

e. Keterangan Terdakwa

berdasarkan pasal 189 ayat 1 kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHP), menyebutkan bahwa keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di persidangan tentang perbuatan yang dia lakukan atau dia ketahui sendiri atau dialami sendiri.¹⁴

5. Pembuktian menurut undang-undang ITE dalam tindak pidana perjudian online

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi banyak muncul kejahatan dibidang *cyber*. sehingga pemerintah membuat dan mengesahkan suatu aturan yang mengatur segala kejahatan di bidang *cyber* yakni UU ITE. dalam hal ini termasuk juga perjudian online yang diatur didalam UU ITE, pasal 27 ayat 2 (dua), unsur-unsur esensial tindak

¹⁴ Pasal 189 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

pidana perjudian online dikemukakan pada Pasal 27 ayat 2 (dua) UU ITE, yaitu unsur subjektif dan unsur obyektif. Yaitu sebagai berikut :

1. Unsur Subjektif

a. Setiap Orang

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan, baik warga Negara Indonesia, Warga Negara Asing maupun badan hukum, yang melakukan tindak pidana.

b. Dengan Sengaja Tanpa Hak

Sengaja mengandung makna “mengetahui” dan “menghendaki” dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.

2. Unsur Obyektif

a. Mendistribusikan

Yang dimaksud dengan mendistribusikan adalah mengirimkan informasi atau dokumen elektronik kepada beberapa pihak atau tempat melalui atau dengan sistem elektronik.

b. Mentransmisikan

Yang dimaksud dengan mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan informasi atau dokumen

elektronik dari satu pihak atau tempat ke satu orang atau tempat lain.

c. Membuat Dapat Diaksesnya.

Yang dimaksud dengan membuat dapat diaksesnya memiliki makna membuat informasi atau dokumen elektronik dapat diakses orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung.

d. Informasi atau dokumen elektronik

Yang dimaksud dengan informasi elektronik pada intinya adalah yaitu konten sedangkan dokumen elektronik merupakan media dari konten itu sendiri yang dapat berbentuk analog, digital, elektromagnetik, atau optical.

e. Muatan perjudian.

Yang dimaksud dengan muatan perjudian ialah website perjudian dan didalamnya ada bursa taruhan yang dibangun oleh seseorang.

sistem pembuktian dalam cybercrime bersifat khusus (*lex specialis*) sehingga dalam pengaturan mengenai alat bukti elektronik telah diatur didalam Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, yang termaktup dalam pasal 5, antara lain :

- UU ITE menyebutkan bahwa alat bukti elektronik/dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah, dan merupakan perluasan dari alat bukti. Berdasarkan pasal 44 UU ITE menyebutkan : alat bukti penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan

sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-undang ini adalah sebagai berikut :

- a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan; dan
- b. Alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta pasal 5 ayat 1 (satu), ayat 2 (dua) dan ayat 3 (tiga).¹⁵

B. Teori Pembuktian dalam Hukum Islam

1. Definisi Pembuktian

Didalam hukum pidana islam, pembuktian disebut *al-bayyinah*, secara etimologi *al-bayyinah* merupakan suatu keterangan, yaitu segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan sesuatu apa yang dia lihat dan untuk membenarkan sesuatu yang benar adanya. Secara teminologi *al-bayyinah* yaitu upaya untuk membuktikan seseorang melakukan tindak pidana dengan suatu alasan dan dalil yang logis dan sampai mempunyai suatu keyakinan, bahwa benar terjadi perbuatan tindak pidana. at digunakan untuk menjelaskan yang haq (benar).¹⁶

¹⁵ Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik

¹⁶ Sobhi Mahmassani, *Falsafatu At-Tasyri' Fi Al-Islam, Terjemah, Ahmad Sudjono, Filsafat Hukum Dalam Islam*, (Bandung : PT. Alma arif , 1976), 239.

البينة على المدعي

¹⁸ Teungku M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan hukum acara islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 129.

“ pembuktian dibebankan kepada penggugat (*affirmanti incoumbil probato*).”

Adagium hukum tersebut menyatakan, bahwa untuk mendapatkan hukum sebagaimana dengan *petitum* gugatannya, seseorang penggugat harus mengemukakan bukti-bukti yang membenarkan dalil-dalil gugatannya.¹⁹

Dalam hal upaya membuktikan seseorang bersalah atau tidak, maka seseorang harus memberikan suatu bukti-bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan yang dibuktikan didepan persidangan. Al-qur'an dalam surat al-baqarah ayat 282, menyebutkan tentang keharusan suatu pembuktian. yaitu sebagai berikut:

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ
مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا
الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا

Artinya: “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil”.²⁰

¹⁹ Qoyyim Ibnu Al-jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2005), 15.

²⁰ Kementrian Agama Republik Indonesia. *Alqur'an dan Terjemahnya*,

Artinya: “Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi saw bersabda: sekiranya diberikan kepada manusia apa saja yang digugatnya, tentulah manusia akan menggugat apa yang dia kehendaki, bai jiwa maupun harta, akan tetapi sumpah itu dihadapkan kepada tergugat”.

الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمَدْعَىٰ وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَىٰ عَلَيْهِ

Hadis diatas adalah suatu dasar atas suatu pembebanan pembuktian. Dalam arti seseorang yang menggugat wajib membuktikan bahwa si tergugat benar-benar melakukannya. Begitupun dengan tergugat,

2. Macam-macam Alat Bukti Dalam Hukum Islam

Didalam kitab *ath-thurq al-hukmiyah* Ibnu al-Qayyim mengatakan bahwa, alat bukti yang dapat memperkuat dakwaan atau tuntutan, terdapat sepuluh (10) alat bukti, yang telah disimpulkan dari al-Qur'an, hadits yang shahih, atau dari praktik-praktik Rosulullah Saw. Yaitu:

- a. Penguasaan atau *Al-Yadud al-mujarradah* , yaitu alat bukti yang tidak memerlukan suatu sumpah, seperti anak-anak yang berada di pengampuannya.
- b. Pengingkaran atau *Al-Inkar al-Mujarrad* , seperti pengingkaran yang telah mengaku berutang kepada orang yang

2. Macam-macam Alat Bukti Dalam Hukum Islam

Didalam kitab *ath-thurq al-hukmiyah* Ibnu al-Qayyim mengatakan bahwa, alat bukti yang dapat memperkuat dakwaan atau tuntutan, terdapat sepuluh (10) alat bukti, yang telah disimpulkan dari al-Qur'an, hadits yang shahih, atau dari praktik-praktik Rosulullah Saw. Yaitu:

- a. Penguasaan atau *Al-Yadud al-mujarradah* , yaitu alat bukti yang tidak memerlukan suatu sumpah, seperti anak-anak yang berada di pengampuannya.
- b. Pengingkaran atau *Al-Inkar al-Mujarrad* , seperti pengingkaran yang telah mengaku berutang kepada orang yang

2. Macam-macam Alat Bukti Dalam Hukum Islam

Didalam kitab *ath-thurq al-hukmiyah* Ibnu al-Qayyim mengatakan bahwa, alat bukti yang dapat memperkuat dakwaan atau tuntutan, terdapat sepuluh (10) alat bukti, yang telah disimpulkan dari al-Qur'an, hadits yang shahih, atau dari praktik-praktik Rosulullah Saw. Yaitu:

- a. Penguasaan atau *Al-Yadud al-mujarradah* , yaitu alat bukti yang tidak memerlukan suatu sumpah, seperti anak-anak yang berada di pengampuannya.
- b. Pengingkaran atau *Al-Inkar al-Mujarrad* , seperti pengingkaran yang telah mengaku berutang kepada orang yang

- ## 2. Macam-macam Alat Bukti Dalam Hukum Islam
- Didalam kitab *ath-thurq al-hukmiyah* Ibnu al-Qayyim mengatakan bahwa, alat bukti yang dapat memperkuat dakwaan atau tuntutan, terdapat sepuluh (10) alat bukti, yang telah disimpulkan dari al-Qur'an, hadits yang shahih, atau dari praktik-praktik Rosulullah Saw. Yaitu:
- a. Penguasaan atau *Al-Yadud al-mujarradah* , yaitu alat bukti yang tidak memerlukan suatu sumpah, seperti anak-anak yang berada di pengampuannya.
 - b. Pengingkaran atau *Al-Inkar al-Mujarrad* , seperti pengingkaran yang telah mengaku berutang kepada orang yang

²² H. A Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), 34.

Nashr Fariid Waashil mengemukakan mengenai prihal pembuktian yang dikutip oleh Anshoruddin Bahwa terdapat 11 alat bukti, yaitu :²³

- Pengakuan
- Saksi
- Sumpah
- Pengambilan sumpah
- Penolakan sumpah
- Tulisan
- Saksi ahli
- Qarinah
- Pendapat ahli
- Pemeriksaan setempat
- Permintaan keterangan orang yang bersengketa

Pendapat lain mengenai alat bukti juga dikemukakan oleh Hasbi Ash-Siddieqy yang mengatakan bahwa terdapat 6 alat bukti. Yaitu :²⁴

- Iqrar* (Pengakuan)
- Syahadah* (Kesaksian)
- Yamin* (Sumpah)
- Nukul* (Menolak sumpah)

²³ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut*.,59.

²⁴ M.Hasbi Teungku Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam.*,136.

Surat al-baqorah ayat 282 merupakan suatu dasar pijakan hukum mengenai suatu kesaksian yang diwajibkan kepada saksi untuk memmberikan kesaksiannya, yaitu :

وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا^ج

Artinya: janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil

3. *Qarinah* atau Persangkaan/Petunjuk-petunjuk

Qarinah atau persangkaan atau petunjuk-petunjuk menurut bahasa diambil dari kata “*muqaromah*” memiliki arti petunjuk.

Secara istilah qarinah diartikan dengan:

الأدلة التي يستنبطها القاضي من وقائع الدعوى وأحوالها باجتهاد

“Tanda-tanda yang merupakan hasil kesimpulan hakim dalam menangani berbagai kasus melalui ijtihad”

Qorinah atau persangkaan atau pentunjuk secara umum dibagi atas 2 macam, antara lain :

- a. *Qarinah Qonuniyyah* yaitu qarinah yang mengacu kepada suatu ketentuan undang-undang.
- b. *Qarinah Qodloiyyah* yaitu qarinah yang berdasarakan suatu keyakinan hakim setelah memeriksa perkara yang dihadapannya.

Nashr farid washil menyebutkan bahwa terdapat 2 macam sumpah. Antara lain :³²

- ## 5. *Nukul* atau Penolakan sumpah

Masih terdapat perbedaan pendapat dikalangan fuqaha mengenai alat bukti penolakan sumpah. Madzab Hanafi dan Imam Ahmad berpendapat penolakan sumpah merupakan suatu alat bukti yang dapat digunakan oleh majelis hakim sebagai salah satu dasar

³³ H. A Basiq Djalil, *Peradilan Islam...*, 53.

dalam memutuskan perkara, jika penolakan sumpah itu telah mencapai sebanyak tiga kali.³⁴

Namun asy syafi'i dan imam malik, berpendapat bahwa penolakan sumpah tidak bisa digunakan sebagai alat bukti, tetapi apabila penggugat menolak untuk bersumpah maka sumpah akan dikembalikan kepada penggugat dan apabila penggugat bersumpah maka dimenangkan. Sedangkan menurut Ibnu Qayyim, penolakan sumpah merupakan suatu alat bukti yang bisa dijadikan sebagai dasar untuk memutus suatu perkara. Namun Adzahari dan Ibnu Hazem berpendapat bahwa suatu penetapan hukum berdasarkan dengan suatu alat bukti penolakan sumpah, yakni tidak memiliki suatu dasar hukum yang kuat.³⁵

**PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SAMPANG NOMOR
136/PID.B/2015/PN.SPG TENTANG TINDAK PIDANA PERJUDIAN**

Kasus perjudian yang terjadi di kota sampang, dalam putusan pengadilan negeri sampang perkara nomor register 136/Pid.B/2015 /PN.Spg dengan terdakwa bernama Rahmat Hidayat. Terdakwa lahir di kota sampang dengan tanggal lahir 05 Desember 1980 dan berusia 35 tahun. Terdakwa bertempat tinggal di Jl. Imam Ghazali Rt/Rw 005/001 kel. Gunung sekar sampang, kabupaten sampang.

Terdakwa rahmat hidayat pada hari rabu tanggal 17 juni 2015 sekitar pukul 13:00 wib atau sekitar waktu setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan juni 2015 bertempat di jalan diponegoro kelurahan banyuwayar kec. Sampang setidak-tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri sampang (yang berhak memeriksa / mengadili perkara tersebut), *sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum*”.

[illegible]

selanjutnya terdakwa membuat alamat wibsetnya yaitu istanaimpian.com dengan menggunakan handpone miliknya yang bermerek Oppo yang ada jaringan internet dengan nomor hp. 081703399467.

Setelah masuk dalam wibsetya kemudian terdakwa memasukkan IDnya yang bernama Rahmat Hidayat dengan password 123456789 dan setelah masuk dalam wibsetya tersebut kemudian terdakwa memasukkan nomor taruhan 2 angka sampai dengan 4 angka serta memasukkan besaran uang taruhannya, setiap 2 angka perseribunya mendapatkan Rp. 70.000. sedangkan untuk angka 3 sampai dengan 4 terdakwa masih belum mengetahui dapat berapa dikarenakan terdakwa belum pernah menaruh taruhan sampai dengan 4 angka, dan Setiap 1 angka jitu/cocok angka untuk Rp. 50.000 mendapatkan Rp. 350.000.

setelah terdakwa memasukkan nomor judi togel tersebut kemudian terdakwa mengirimkan uang taruhan ke rekening BCA atas nama Fany Lestari dengan nomor rekening 6870826611 dengan melalui nomor rekening 8960280084 dengan cara melalui setoran tunai ATM BCA.

Setelah terdakwa mengirimkan uang tersebut terdakwa tinggal menunggu nomor judi togel yang akan keluar, terdakwa mengetahui bahwa nomor togel tersebut keluar dengan cara membuka wibsitanya kembali istanaimpian.com pada pukul 17:45 Wib terdakwa membuka wibsetnya istanaimpian.com

Terdakwa mendapatkan 27% dari kemenangan dari titipan nomor teman-temanya jika nomor tombokannya keluar. Dan omset penghasilan terdakwa rata-rata setiap harinya dari judi togel online mendapatkan antar Rp. 100.000 sampai dengan Rp. 200.000. setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa melakukan perjudian togel online tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib sehingga terdakwa dibawa dan ditangkap oleh pihak kepolisian.

Dari hasil pemeriksaan di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan bukti-bukti surat dalam hal mana setelah majelis hakim menghubungkan juga menyesuaikan satu dengan yang lainya dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Untuk dapat didakwakan dakwaan primer pasal 303 ayat (1) ke 2 e kuhp harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

Frasa barang siapa tiada lain adalah orang yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dihukum atau subjek pelaku dari suatu tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur tersebut adalah Rahamat Hidayat yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sebagaimana subjek hukum dalam surat dalwaan.

perjanjian atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu, telah terpenuhi.

Menimbang bahwa dalam fakta-fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti di persidangan benar bahwa terdakwa pada hari rabu tanggal 17 juni 2015 sekitar pukul 13.00 di jln diponegoro kelurahan banyuwanyar kec,sampang terdakwa telah menawarkan bermain judi dengan cara sebagai berikut:

“ Menimbang bahwa sebelumnya terdakwa menerima pesanan nomor judi togel dari teman terdakwa yang bernama sahed, setelah terdakwa menerima pesanan nomor dari sahed selanjutnya terdakwa membuat alamat wibsetnya yaitu istanaimpian.com dengan menggunakan handpone miliknya yang bermerek Oppo yang ada jaringan internet dengan nomor hp. 081703399467.

Setelah masuk dalam wibsetya kemudian terdakwa memasukkan IDnya yang bernama Rahmat Hidayat dengan password 123456789 dan setelah masuk dalam wibsetya tersebut kemudian terdakwa memasukkan nomor taruhan 2 angka sampai dengan 4 angka serta memasukkan besaran uang taruhannya, setiap 2 angka perseribunya mendapatkan Rp. 70.000. sedangkan untuk angka 3 sampai dengan 4 terdakwa masih belum mengetahui dapat berapa dikarenakan terdakwa belum pernah menaruh taruhan sampai dengan 4 angka, dan Setiap 1 angka jitu/cocok angka untuk Rp. 50.000 mendapatkan Rp. 350.000.

setelah terdakwa memasukkan nomor judi togel tersebut kemudian terdakwa mengirimkan uang taruhan ke rekening BCA atas nama Fany Lestari dengan nomor rekening6870826611 dengan melalui rekening BCA dengan nomor rekening 8960280084 dengan cara melalui setoran tunai ATM BCA.

Setelah terdakwa mengirimkan uang tersebut terdakwa tinggal menunggu nomor judi togel yang akan keluar, terdakwa mengetahui bahwa nomor togel tersebut keluar dengan cara membuka wibsitenya kembali istanaimpian.com pada pukul 17:45 Wib terdakwa membuka wibsetnya istanaimpian.com dengan memasukkan Id dan Password, apabila nomor

togel yang terdakwa tombakan keluar terdakwa akan langsung mengetahui jumlah hasil uang perjudian togel yang terdakwa taruhkan, setelah mengetahuinya kemudian terdakwa mengetik WD pada menu websitenya untuk memindahkan uang hasil tombakan tersebut kerekening terdakwa.

Menimbang bahwa terdakwa menerima, uang judi titipan dari teman terakwa yangmana dari titipan uang judi teman-teman terdakwa tersebut apabila nomor tombakan keluar, terdakwa mendapatkan upah 27% dari kemanagn terdakwa dan umset penghasilan terdakwa rata-rata setiap harinya judi togel online tersebut antara Rp. 100.000 sampai dengan Rp. 200.000 dan setelah melakukan pemeriksaan ternyata, terdakwa melakukan permainan judi togel jenis online tersebut tanpa izin dari yang berwajib sehingga terdakwa, dibawa dan ditagkap oleh pihak kepolisian berikut barang buktinya berupa satu unit Hp merk oppo neo warna ungu, uang tunai sebesar Rp. 110.000 dua buah buku tabungan BCA masing-masing atas nama Rahmat Hidayat No. Rek : 8960280084 dan 1 buah ATM dengan nomor 6019002627501259.”

Oleh karena semua unsur dari pasal 303 ayat (1) ke 2e KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan primair. Selanjutnya karena dakwaan primair jaksa penuntut umum telah terpenuhi maka majelis hakim maka tidak akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya.

D. Amar Putusan

Memperhatikan pasal 303 ayat (1) ke 2e KUHP dan undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan maka amar Putusan hakim pengadilan negeri sampang nomor register perkara 136/Pid.B/2015/PN.Spg sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa rahmat hidayat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tampa hak dengan sengaja turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan kepadanya adanya suatu syarat”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa rahmat hidayat oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit HP merk oppo new warna ungu
 - b. Uang tunai sebesar Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribuvrupiah) dirampas oleh Negara.
 - c. 2 (dua) buah buku tabungan BCA masing-masing atas nama Rahmat Hidayat no.Rek 8960280084
 - d. 1 (satu) buah kartu ATM dengan nomor 6019002627501259 dikembalikan kepada terdakwa.
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000 (lima ribu rupiah).

ANALISIS HUKUM ACARA PIDANA DAN HUKUM ACARA PIDANA ISLAM TENTANG PEMBUKTIAN PERJUDIAN ONLINE DALAM PUTUSAN NOMOR PERKARA 136/PID.B/2015/PN.SPG

Dalam putusan pengadilan negeri sampang nomor 136/Pid.B/2015/Pn.Spg tentang tindak pidana perjudian online yang dilakukan oleh terdakwa rahmat hidayat. Terdakwa melakukan perjudian online dengan cara mendaftar melalui website istanaimpian.com yang dibuat oleh terdakwa rahmat hidayat dengan password 123456789, kemudian terdakwa memasukkan nomor taruhan beserta nominal taruhan, Setelah itu terdakwa mengirimkan uang taruhan ke rekening BCA atas nama Fany Lestari dengan nomor rekening 6870826611 melalui nomor rekening 8960280084 atas nama Rahmat Hidayat mengirim dengan cara melalui setoran tunai ATM BCA Sampang, jln. Wachid Hassim.

Majelis hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana harus berlandaskan hukum dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat serta sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada putusan pengadilan nomor

“diancam dengan kurungan paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak enam ribu rupiah, barang siapa tanpa izin dengan menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara.”

“diancam dengan kurungan paling lama empat tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah barang siapa ikut serta permainan judi yang diadakan dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang.”

Maka dalam putusan perkara nomor 136/Pid.B/2015/Pn.Spg majelis hakim
am memutus perkara tindak pidana perjudian online yang dilakukan oleh

“diancam dengan kurungan paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak enam ribu rupiah, barang siapa tanpa izin dengan menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara.”

Majelis hakim sebelum menjatuhkan sanksi hukuman dalam memberikan putusan kepada terdakwa, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan. Adapun hal yang meringankan dalam pertimbangan hakim yang tertuang dalam putusan nomor 136/Pid.B/2015/Pn.Spg, yaitu terdakwa mengaku atas perbuatannya dengan cara terusterang, mengatakan dirinya menyesal, menyatakan tidak akan mengulagi perbuatan tersebut, serta terdakwa mempunyai tanggungan keluarga. Sedangkan hal yang memberatkan terdakwa yaitu perbuatan terdakwa ini meresahkan masyarakat.

Dalam kasus tindak pidana perjudian online ini, telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang terdapat pada pasal 303 ayat 1 (satu) ke-2 KUHP, untuk menyatakan terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan kepadanya maka harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana, yaitu :

[illegible]

2. Dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjian atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu .

Selanjutnya terkait dengan unsur yang ke dua “dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjian atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu” yang dalam unsur ini adalah bahwa terdakwa Rahmat Hidayat memberikan kesempatan dan menawarkan ke khalayak umum untuk bermain judi dan unsur ini terpenuhi.

menghukum terdakwa Rahmat Hidayat dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Dan dibebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Menganalisis lebih lanjut dalam perkara ini, seharusnya semua aparat penegak hukum, dalam hal ini jaksa penuntut umum dan khususnya majelis hakim harus lebih memahami dan mencermati lebih mendalam dalam kasus atau perkara yang dihadapi. Perjudian umum (*konvensional*) dan perjudian online merupakan suatu tindak pidana berbeda walaupun memiliki sifat yang sama yaitu judi. Perjudian umum (*konvensional*) merupakan tindak pidana (*lex generalis*) sedangkan perjudian online merupakan tindak pidana (*lex specialis*) dalam hal ini aturannyapun berbeda aturan mengenai Perjudian umum (*konvensional*) diatur didalam pasal 303 KUHP sedangkan Perjudian *online* diatur didalam Pasal 27 ayat 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik (ITE).

Pada dakwaan di atas hakim seharusnya dalam menentukan suatu putusan pidana yang sekiranya sesuai dengan hasil dari pembuktian di depan persidangan. Jika melihat dari dakwaan jaksa penuntut umum di atas, menurut penulis fakta hukum yang terdapat diputusan, alat bukti, keterangan terdakwa, keterangan saksi, memang pada dasarnya telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat di

Maka dalam hal ini jaksa maupun hakim seharusnya menerapkan pasal 27 ayat (2) UU ITE karena perjudian online merupakan tindak pidana *lex specialis*. Didalam pasal 27 ayat 2 UU ITE yang telah mengatur tindak pidana perjudian online yang tidak diatur didalam pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP, pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP merupakan pasal yang hanya mengatur tindak pidana perjudian biasa (*Konvensional*).

Pembuktian merupakan ketentuan yang mengatur alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang yang boleh dipergunakan hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. majelis hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkan dalam putusan, secara limitatif, sebagaimana yang disebut dalam pasal 184 KUHAP. Pembuktian yang terdapat didalam putusan perkara nomor 136/Pid.B/2015/Pn.Spg telah sesuai dengan KUHAP, untuk menjerat seorang setidaknya-tidaknya minimal 2 alat bukti maka

terdakwa dapat di proses di persidangan hai itu sesuai dengan pasal 183 KUHAP dan Pasal 184 KUHAP.

Meninjau pembuktian tindak pidana perjudian online dalam putusan perkara nomor 136/Pid.B/2015/PN.Spg yang dianalisis oleh penulis, perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa termasuk dalam kejahatan tindak pidana cyber (*cybercrime*) dan di katagorikan sebagai tindak pidana khusus (*Lex Specialis*). Hal ini mengacu pada Alat bukti serta barang bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum di persidangan yang menunjukkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana perjudian online, yang diatur didalam pasal 27 ayat 2 UU ITE.

Hal ini mengacu kepada keterangan terdakwa dan keterangan saksi serta barang bukti yang ada dipersidangan. Adapun alat bukti dan barang bukti yang ada di persidangan, dalam perkara ini adalah :

1. Keterangan saksi Budi Cahyono

Saksi merupakan anggota kepolisian kabupaten Sampang, yang menangkap terdakwa. Pada pokoknya saksi Budi Cahyono menerangkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana perjudian online.

2. Keterangan Saksi Rochma Christiawan

3. Keterangan terdakwa Rahmat Hidayat

Adapun barang bukti dalam putusan perkara nomor 136/Pid.B/2015/PN.Spg adalah sebagai berikut :

- Namun berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum hakim yang tertuang dalam putusan perkara nomor 136/Pid.B/2015/PN.Spg, majelis hakim kurang cermat dan kurang teliti, dimana dalam pertimbangan-pertimbangannya menitik beratkan salah atau tidaknya berdasarkan keyakinan. Hal ini Nampak jelas dalam pertimbangan putusan ini penilaian yang dilakukan oleh majelis hakim lebih kepada keyakinan tanpa menguji dan mengaitkan keyakinan tersebut

dengan alat bukti yang sah serta barang bukti yang ada didalam persidangan. Misalnya dalam hal ini alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti.

Menganalisis lebih lanjut, Dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di jelaskan pada pasal 5 ayat (1) Ayat (2) dan ayat (3) mengenai alat bukti yang ada dalam UU ITE, Maksud dari ayat-ayat tersebut, bahwa segala dokumen elektronik atau hasil cetaknya merupakan salah satu alat bukti yang sah dan menguatkan sebuah tindak pidana dikatakan sebagai tindak pidana ITE. Konteks dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis, bahwa telah jelas dalam pertimbangan majelis hakim terdapat sebuah alat bukti berupa dokumen elektronik. Dalam hal ini adalah, buku tabungan BCA lengkap dengan ATM-nya. Hal inilah kemudian yang menjadi perbedaan antara tindak pidana perjudian secara umum (*konvensional*) dengan tindak pidana perjudian online.

Contoh lain dalam pertimbangan majelis hakim terdapat alat bukti berupa 1 unit HP merk OPPO Neo Warna ungu yang mana Hp tersebut didalam pertimbangan majelis hakim dikatakan bahwa Hp tersebut digunakan untuk membuat alamat website yaitu istanaimpian.com dengan menggunakan hp oppo milik terdakwa yang ada jaringan internetnya dengan nomor Hp. 081703399467.

Dengan adanya alamat website sebagaimana dalam putusan ini mengindikasikan serta meyakinkan bahwa tindak pidana ini termasuk tindak pidana online.

Berdasarkan unsur-unsur yang terdapat di pasal 27 ayat 2 dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan, tindak pidana yang dilakukan terdakwa Rahmat Hidayat telah memenuhi unsur-unsur pasal 27 ayat 2 (Dua) UU ITE yakni antara lain unsur subyektif dan unsur obyektif.

Maka oleh sebab itu dalam putusan perkara nomor 136/Pid.B/2015/Pn.spg penulis berpendapat bahwa majelis hakim yang memeriksa dan mengadili terdakwa Rahmat Hidayat dapat dikatakan bahwa kurang tepat dalam memutus perkara ini berdasarkan Undang-undang yang berlaku. Majelis hakim hanya lebih condong dengan dakwaan yang di ajukan oleh jaksa penuntut umum tanpa mempertimbangkan fakta-fakta baru yang muncul didalam persidangan, dan majelis hakim lebih cenderung mengutamakan keyakinan hakim dari pada ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

Bahwa berdasarkan analisis di atas sepatutnya majelis hakim memutus perkara tersebut menggunakan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik. Ketika fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan menyatakan bahwa sebuah tindak pidana telah terbukti dengan unsur-unsur sebuah pasal tertentu, maka majelis hakim harus dan patut untuk

memutus berdasarkan pasal yang relevan. Meskipun dalam konteks ini di luar dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

C. Analisis Hukum Acara Pidana Islam Tentang Pembuktian Perjudian Online Dalam Putusan Perkara Nomor 136/Pid.B/2015/Pn.Spg

Hakikatnya fakta yang terungkap dalam suatu penyidikan maupun dalam penyelidikan berlaku sebagai pemeriksaan sementara, karena sejatinya fakta yang terungkap dalam persidangan, yang sepatutnya digunakan majelis hakim sebagai dasar pertimbangan untuk memutus suatu perkara.

Di dalam hukum pidana Islam terdapat beberapa perbedaan pendapat mengenai alat bukti. Namun para fuqaha sepakat bahwa alat bukti yang sah dalam hukum Islam antara lain: pengakuan (*ikrar*), kesaksian (*syahadah*), sumpah (*yamin*), penolakan sumpah (*nukul*), *qasamah*, dan keyakinan hakim. Terkait putusan ini penulis akan mengkaji beberapa alat bukti yang digunakan dalam pembuktian di persidangan secara sistematis berdasarkan urutan kekuatan alat bukti.

Pertama, yakni adalah pengakuan atau *ikrar*. Pengakuan merupakan bentuk keterangan terdakwa di dalam persidangan dalam upaya memberikan keterangan terhadap perbuatan yang telah dilakukan. Pengakuan dapat dilakukan dengan ucapan lida, dapat pula dilakukan dengan isyarat oleh orang yang tidak dapat berbicara, asal isyarat tersebut dapat diketahui umum. Menurut hukum asal, apabila terdakwa sudah mengaku maka hakim dapat memutus perkara dengan

melihat dari pengakuan terdakwa tersebut. Dalam hal ini terdakwa memberikan pengakuan dengan betuk lisan di hadapan majelis hakim di depan persidangan, dalam putusan ini majelis hakim pun telah memeriksa keterangan terdakwa. Dasar pengakuan atau *ikrar* sebagai alat bukti menurut peradilan Islam adalah Qs. Al-Nisaa ayat 135 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ ؕ أَوِ ٱلْوَالِدَيْنِ
وَٱلْأَقْرَبِينَ ؕ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوَّلَىٰ بِهِمَا ؕ فَلَا تَتَّبِعُوا ٱلْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا
وَإِن تَلُودَا أَوْ تَعْزِضُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

Berdasarkan ayat diatas, bahwa dalam hukum islam pengakuan merupakan suatu alat bukti yang menempati urutan pertama. Pengakuan yaitu suatu bentuk keterangan terdakwa terhadap tindak pidana yang telah dilakukan,

Kedua, yakni kesaksian atau *syahadah*. Islam memandang saksi termasuk hal penting dalam penegakan kebenaran dan keadilan. Dalam putusan ini hakim telah memeriksa dan mendengar dari 2 orang saksi yang diajukan oleh jaksa

penuntut umum yaitu Budi Cahyono dan Rochma Cristiawan. Berdasarkan kriteria saksi yang ada di hukum pidana islam maka saksi yang di ajukan didepan persidangan, sudah memenuhi sebagaimana kriteria saksi dalam hukum pidana islam. Sebagimana dalam al-qur'an surah al-baqarah ayat 282.

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا

Artinya: Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil.

Dengan demikian, pembuktian menurut hukum acara pidana islam, dalam putusan nomor 136/Pid.B/2015/Pn.Spg sudah sesuai dengan kriteria pembuktian yang ada di hukum acara pidana islam. Namun menganalisis lebih lanjut mengenai pembuktian perjudian online yang terdapat dalam putusan perkara nomor 136/Pid.B/2015/Pn.Spg. di dalam putusan tersebut terdakwa mengakui bahwa melakukan tindak pidana perjudian online, dan selaras dengan pengakuan terdakwa rahmat hidayat, kedua saksi tersebut membenarkan bahwa yang dilakukan terdakwa adalah tindak pidana perjudian online.

Dalam putusan tersebut Pertimbangan majelis hakim tidak mempertimbangkan pengakuan dari terdakwa dan saksi mengenai tindak pidana perjudian *online* yang telah dilakukan oleh terdakwa Rahmat Hidayat, Dalam hal ini hakim kurang mencermati dan memahami terhadap perbuatan terdakwa Rahmat Hidayat, Pada dasarnya hakim wajib menggali dan memahami nilai-nilai hukum yang berlaku di masyarakat. Dan hakikatnya hakim sebagai pelindung serta penegak keadilan yang memberikan perlindungan serta menegakkan keadilan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT, yang berbunyi:

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan... (QS. an-Nisaa':135)

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat diambil suatu kesimpulan yaitu sebagai berikut :

- 70

3. Sistem pembuktian dalam Hukum Acara Pidana Islam, alat bukti terdiri dari pengakuan (*ikrar*), kesaksian (*syahadah*), petunjuk (*qorinah*), sumpah (*yamin*), dan penolakan sumpah (*nukul*). Di dalam Putusan pengadilan Negeri Kota Sampang dalam perkara nomor 136/Pid.B/2015/PN.Spg ini dalam pembuktian telah mengajukan alat bukti berupa pengakuan, kesaksian, petunjuk, dan sumpah. Dalam hal ini pembuktian yang ada di dalam persidangan sudah sesuai dengan pembuktian yang ada didalam Hukum Acara Pidana Islam.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran, Demi menegakkan keadilan dan memberikan perlindungan bagi masyarakat sudah sepatutnya aparat penegak hukum (hakim) dan jaksa harus senantiasa menegakkan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terlebih lagi mampu mengejewantahkan hakikat penegakan hukum sebagaimana mestinya agar tercapainya suatu hakikat dari suatu Negara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Siradjuddin. *24 Masalah Agama*. Jakarta: Pustaka Tarbiyah Baru, 2013.
- Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Al-jauziyah, Ibnu qoyyim. *Hukum Acara Peradilan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Anshoruddin. *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Christine dan Kansil. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.
- Djalil, A Basiq. *Peradilan Islam*. Jakarta: Amzah, 2012.
- Fahroji, Ikhwan. *Hukum Acara Pidana Korupsi*. Jakarta: Setara Press, 2016.
- Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan (Edisi Kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Hasan, Mustofa. Beni Ahmad Sabani. *Hukum Pidana Islam*. Bandung : CV Pustaka Setia, 2013.
- Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika. 2013.
- Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Alqur'an dan Terjemahnya*. Jakarta : Pt Macananjaya Cemerlang, 2015.
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial*. Jakarta : Cv Rajawali, 1983.
- Lubis, Sulaikhan. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

- Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005.
- Mahmassani, Sobhi. *Falsafatu at-Tasyri' fi al-islam, terjemah, ahmad sudjono, filsafat hukum dalam islam*. Bandung : PT. Alma arif, 1976.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial* .Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991.
- Prinst Darwan. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. Jakarta: Djambatan. 1998.
- Syamsuddin, Aziz. *Tindak Pidana Khusus*. Cet. II. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Siswanto, Sunarso. *Filsafat Hukum Pidana Konsep, Dimensi, dan Aplikasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2016.
- Teungku, M.Hasbi Ash-Shiddeqy. *Filsafat hukum islam*. Jakarta: bulan bintang, 1970.
- Teungku, M.hasbi Ash-Shiddieqy. *Peradilan dan hukum acara islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian .
- Yudowidakdo, Hendrastanto. *Kapita Selektu Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.